

**PERAN GUGUS TUGAS
DALAM PELINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN
KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KOTA YOGYAKARTA**

Anisah Karim¹, Adlia Nur Zhafarina²

INTISARI

Di Indonesia, kasus tindak pidana perdagangan orang tidaklah sedikit. Berdasarkan bukti empiris, anak dan perempuan termasuk dalam kelompok orang yang paling banyak sekaligus rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diwajibkan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, salah satu diantaranya dengan membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Jika dikaji lebih lanjut, pencegahan dan penanganan tersebut berkaitan erat dengan perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, serta menganalisis perihal perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta termasuk peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris melalui pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dengan cara menelaah data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlindungan terhadap anak dan perempuan korban tindak pidana perdagangan orang di Kota Yogyakarta dilakukan melalui upaya perlindungan preventif juga represif. Pelindungan preventif dilakukan melalui berbagai penyuluhan dan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media lain yang tersedia. Pelindungan represif dilakukan melalui berbagai upaya pemberian beberapa pelayanan seperti pengaduan, pendampingan korban dari awal penyelidikan hingga pemulihan korban, penyediaan rumah aman, pemeriksaan dan pemulihan psikologi korban, pemantauan kondisi kesehatan termasuk *visum et repertum*, rehabilitasi sosial, bimbingan fisik, bimbingan keterampilan, dan sebagainya. Kemudian, berkenaan dengan peran Gugus Tugas Kota Yogyakarta dalam mewujudkan perlindungan tersebut ialah dengan memperkuat dan memperluas kerjasama melalui koordinasi antar lembaga terkait, organisasi masyarakat terkait, dan pihak terkait lainnya, serta menyisipkan upaya-upaya perlindungan sebagaimana dimaksud ke dalam program kerja masing-masing instansi tempat anggota Gugus Tugas Kota Yogyakarta bekerja.

Kata Kunci: Gugus Tugas, Pelindungan Korban, Perdagangan Orang.

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

**THE ROLE OF THE TASK FORCE
IN PROTECTING CHILDREN AND WOMEN
VICTIMS OF HUMAN TRAFFICKING CRIMES
IN THE CITY OF YOGYAKARTA**

Anisah Karim¹, Adlia Nur Zhafarina²

ABSTRACT

In Indonesia, cases of human trafficking are not few. Based on empirical evidence, children and women are the groups in society that are the most numerous and most vulnerable to becoming victims of human trafficking crimes. Through the Republic of Indonesia Law Number 21/2007, the central government and regional governments are obliged to eradicate the crime of human trafficking, one of which is by forming a task force for the prevention and handling of human trafficking at the central, provincial, and district or city levels. If examined further, the prevention and handling is closely related to victim protection. This research aims to find out, describe, and analyze the protection of children and women victims of human trafficking in Yogyakarta City including the role of the Yogyakarta City Task Force in realizing the protection. This research uses a normative-empirical legal research method through a statutory approach. The data sources were obtained by examining primary data in the form of interview results and secondary data in literature studies. The data analysis was done through qualitative descriptive analysis.

The results of this research conclude that the protection of children and women victims of human trafficking crime in Yogyakarta City is carried out through preventive and repressive protection efforts. Preventive protection is carried out through various counseling and socialization both directly and through other available media. Repressive protection is carried out through various efforts to provide several services such as complaints, victim assistance from the beginning of the investigation to the return of victims, provision of shelter, psychological examination and recovery of victims, monitoring of health conditions including visum et repertum, social rehabilitation, physical guidance, skills guidance, and so on. Then, related to the role of the Yogyakarta City Task Force in realizing this protection is to strengthen and expand cooperation through coordination between related agencies, related community organizations, and other related parties, as well as inserting protection efforts as referred to in the work program of each agency where the Yogyakarta City Task Force members are working.

Keywords: Task Force, Victim Protection, Human Trafficking.

¹ Student of Bachelor of Law Study Program, Jenderal Achmad Yani Yogyakarta University.

² Lecturer of Bachelor of Law Study Program, Jenderal Achmad Yani Yogyakarta University.